

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Buku Vademecum Kehutanan Indonesia*, (2020), Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Dwidja Priyanto, (2017), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok.
- Husain, I. H. A. (2019). *Ketahanan Dasar Lingkungan: Basic Environment* Vol. 1. Sah Media.
- Khalisah Hayatuddin, S. H., & Serlika Aprita, S. H. (2021). *Hukum Lingkungan*. Prenada Media.
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana press.
- Manullang, H. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. LPPM UHN Press.
- Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Nuansa Cendekia. Sahide, M. A. K. (2019). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah*. Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. PT. Nuansa Cendekia, Bandung.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Krimonologi*. PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Takdir Rahmadi, (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. 1., Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers
- Topan, M. (2019). *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Nusamedia.
- Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Penerbit NEM.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 yang telah dicetak ulang).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. (Lembaran Negara Nomor 1955, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Air dan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Putusan Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.MBO tentang Kebakaran Hutan PT. Kallista

C. JURNAL

- Adi Fajar Winarsa, P., Rukmini, M., & Takariawan, A. (2022). *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. 4(1). 162-174. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>.
- Al Fikri, M., Najicha, F., & Handayani, I. G. A. K. R. (2022). *Application of Strict Liability by Companies in the Context of Environmental Conservation in Indonesia*. Indonesian State Law Review (ISLRev), 5(1). 1-7. <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i1.46522>.
- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). *Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO)*. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2). 119- 131. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.322>.
- Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al-Mukarramah, N. H. (2022). *Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser*. Jurist-Diction 5(3).917-938. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35782>.
- Aulia Andika, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Retrived from: [file \(ui.ac.id\)](http://file.ui.ac.id).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Senaai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1). 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. (2023). *Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi: (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/Pt Dps)*. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum. 1(2). 37-42. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476>.
- Dewi, S. K. (2020). *Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang*. Arena Hukum, Vo 13 No (1), 135-156. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8>.
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Media Bhakti. 3(2). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.38>.

- Fitriani, H. Y. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64-73. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757> .
- Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman, T. (2023). *The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 78–99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>.
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324-346. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- Laily, F. N. (2022). *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.184>.
- Melani, N., & Agustini, S. (2021). *Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 736-748. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.47273>.
- Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). *Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 20 No (2), 237-254. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.
- Putri, R. P. (2019). *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2). 129-134. <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>.
- Rahim, S. A. P., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol 2 No (2), 432-445. doi : <https://doi.org/10.52103/JLG.V2I2.336>.
- Risaldi, W., Mujibussalim, M., & Gaussyah, M. (2018). *Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 547-560. <https://dx.doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11151>.
- Safudin, E. (2019). *Urgensi Sustainable Development Sebagai Etika Pembangunan Di Indonesia*. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law &*

- Family Studies*, 1(2), 165-186.
<http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2025>.
- Sakti, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pid. Sus/2016/PN. Srg)*. *Jurnal Perspektif Hukum*, 2(2), 247-263.
<https://doi.org/10.35447/jph.v2i2.407>.
- Sari, I. (2020). *Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1). 64-80. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.404>.
- Setiawan, E., & Ifrani, I. (2019). *Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup*. *Badamai Law Journal*, 4 (1), 49-68.
<http://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.8287>. Hal 50.
- Sudjiarto, T. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi*. *Honeste Vivere*, 32(2), 62-82.
<https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.132>. Hal 65.
- Syukur, K. A. (2015). *Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 218-228. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.420>.
- Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8). 2463 – 2478.
<http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Widowaty, Y. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 154–169. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.152>.
- Widyawati, H., Suriyanto, & Saputra, D. H. . (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Korporasi*. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(5), 517–530. Retrieved from: <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2403>.